

BAB II

KONDISI OBJEKTIF DAN PROFIL FORUM

KERUKUNAN UMAT BERGAMA KOTA CILEGON

A. Sejarah Kota Cilegon

Cilegon mulanya adalah ibukota distric (setingkat kecamatan) dan menjadi tempat kediaman countroleur. Cilegon adalah sebuah district yang menjadi bagian dari afdeeling Anyer yang masuk ke dalam regentschap serang. District cilegon terbagi ke dalam empat onder district: kawedanaan Cilegon, Bojonegara, Pulomerak dan Krenceng. Cilegon menjadi ramai setelah dijadikan ibukota afdeeling Anyer setelah Anyer luluh lantak akibat tsunami yang ditimbulkan dari letusan gunung krakatau. Kota Cilegon memiliki sebuah alun-alun. Di sebelah utara alun-alun ini terletak rumah asisten residen dan rumah patih dan di sebelah timurnya terdapat sebuah rumah adspirant contoleur (pengawas muda) anyer. Kota cilegon diberi nama menurut pasarnya. Di sebelah selatan dan timur pasar terdapat beberapa

toko Cina, ketika itu di Cilegon terdapat tiga desa besar: desa Jombang wetan, Jombang tengah dan Jombang kulon.¹

Pada tahun 1888 terjadi pemberontakan warga Cilegon yang disebut dengan Geger Cilegon yang di pimpin oleh Ki Wasid sebagai salah satu kiyai yang diberikan kepercayaan untuk memimpin penyerangan terhadap orang-orang eropa dan antek-antek mereka di Cilegon dan sekitarnya, para kiyai berkumpul di kaloran di mana diputuskan bahwa pemberontakan akan dimulai pada suatu hari dalam bulan sura (september 1888). Juga diputuskan bahwa Haji Wasid, Haji Iskak, Haji Tubagus Ismail dan kiyai-kiyai lainnya dari distrik Cilegon dan Kamat watu akan memimpin serangan terhadap Cilegon. Semangat yang menyala-nyala untuk mengenyahkan rejim kolonial membuncah dalam dada dan minda Ki Wasid, ketika sebuah pertemuan tanggal 22 Juni 1888 untuk membahas tanggal mulainya pemberontakan yang dihadiri oleh 60 orang kiyai dan para pengikutnya, Ki Wasid benar-benar menginginkan segera dimulai pemberontakan

¹ Mufti Ali, Hendri F Isnaeni, *Sejarah Kota Cilegon Riwayat Kota Baja Di Ujung Barat Pulau Jawa*,(Cilegon, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2016), h. 160

tersebut. Menurutnya ‘setiap penundaan, hanya akan merugikan perjuangan suci dan membahayakan anggota-anggota komplotan itu sendiri. Pada hari Sabtu 7 juli 1888, setelah para pucuk pimpinan berkumpul akhirnya pertemuan dilanjutkan setelah tengah malam di saneja di rumah Haji Iskak. Pertemuan itu dihadiri oleh para Kiyai dari Jaha, Leuwibeureum, Ciora, Cibeber, Terate udik, Serang, Bekung, dan Tanara. Selain tentu saja Haji Wasid dan Tb. Ismail di rumah Haji Ishak diputuskan bahwa pemberontakan menggulingkan rejim klonial belanda akan dimulai tanggal 29 syawal atau 9 Juli 1888. Betapa pentingnya momen dan locus pertemuan tersebut tergambar dalam fakta bahwa hasil keputusan musyawarah final tersebut selanjutnya disebarluaskan kepada paa Kiyai dan tokoh di seluruh Banten, Jawa Barat dan Jakarta dengan mengutus puluhan kurir untuk melakukan pemberontakan itu. Setelah Indonesia merdeka sistem pemerintahan kolonial dihapuskan pada 4 Juli 1950, pemerintah republik Indonesia dengan persetujuan badan Komite Nasional Indonesia Pusat menghapuskan daerah karesidenan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon, serta membubarkan

dewan perwakilan daerah karesidenan-karesidenan tersebut. Penghapusan tersebut berdasarkan UU No. 11 tahun 1950 tentang pembentukan propinsi Djawa Barat. Berdasarkan pasal 72 Ayat (4) UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, Cilegon sudah memenuhi persyaratan menjadi kota administratif. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa syarat-syarat pembentukan daerah otonom mengikuti kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan dan keamanan, politik serta persyaratan tambahan lainnya, dengan terbentuknya kota administratif diharapkan penanganan pada masalah perkotaan lebih terarah.² Oleh karena itu, pemerintah daerah tingkat II serang kemudian mengeluarkan Surat Bupati KDH (Kepala Daerah) No. 86/sek/Bapp/VII/86 tentang usulan pembentukan kota administratif Cilegon. Akhirnya pemerintah pusat mengabulkan usulan Cilegon menjadi kota administratif pada 1986. Presiden Soeharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/1986 tanggal 17 September 1986

² Mufti Ali, Hendri F Isnaeni, *Sejarah Kota Cilegon Riwayat Kota Baja Di Ujung Barat Pulau Jawa*, (Cilegon, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2016), h. 205

mengenaai pembentukan kota administratif Cilegon. Pada saat yang sama juga ditetapkan lima kota administratif, yaitu Lhokseumawe, Aceh, Pariaman, Sumatra Barat, Metro, Lampung, Klaten, Jawa Tengah, dan Palopo, Sulawesi Selatan. Dengan demikian hingga tahun 1986 telah terbentuk 34 kota administratif di seluruh Indonesia.³

Dalam perkembangannya kotif Cilegon telah memperlihatkan kemajuan yang pesat diberbagai bidang, baik fisik, sosial maupun ekonomi. Perkembangan ii tidak terlepas dari struktur kota yaitu sebagai pintu gerbang Jawa-Sumatera dan perkembangan industri strategis nasional di Cilegon yang diikuti perkembangan pusat perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pemukiman. Dengan demikian untuk lebih meningkatkan penyelenggara pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, kotif Cilegon perlu ditingkatkan menjadi kotamadya Cilegon. Pada 7 Juli 1997, rapat paripurna DPRD Tingkat I Jawa Barat yang dihadiri wakil Gubernur Jawa Barat

³ Mufti Ali, Hendri F Isnaeni, *Sejarah Kota Cilegon Riwayat Kota Baja Di Ujung Barat Pulau Jawa*,(Cilegon, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2016), h. 210

Ekbang Ukman Sutaryan, menyetujui pembentukan kotamadya tingkat II Cilegon dan Depok. Persetujuan ini berdasarkan pertimbangan kedua kotif tersebut telah memenuhi syarat yuridis formal, kelembagaan, dan prosedural.⁴

Harapan menjadi kota madya daerah tingkat II Cilegon tidak terwujud pada oktober 1997. Masih butuh dua tahun lagi sampai akhirnya pemerintah pusat menetapkan UU No. 5 tahun 1999 tanggal 27 april 1999 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Depok dan kotamadya daerah tingkat II Cilegon, dengan duet kepemimpinan Drs. H. Tb. Rifai Halir sebagai pejabat Walikota Cilegon dan H. Zidan Rivai sebagai ketua DPRD cilegon. Sejalan dengan semakin meningkatnya dinamika dan tuntutan masyarakat serta perubahan lingkungan strategis menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Maka pemerintah kota Cilegon bersama DPRD kota Cilegon menetapkan peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang pembentukan empat kecamatan baru. Sehingga kota

⁴ Mufti Ali, Hendri F Isnaeni, *Sejarah Kota Cilegon Riwayat Kota Baja Di Ujung Barat Pulau Jawa*,(Cilegon, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2016), h. 215

Cilegon yang semula terdiri empat kecamatan menjadi delapan kecamatan, yaitu : Cilegon, Ciwandan, Pulomerak, Cibeber, Grogol, Purwakata, Jombang, dan Citangkil. Dengan delapan kecamatan tersebut kota Cilegon memiliki 43 kelurahan.⁵

Asal usul nama Cilegon, di bagian selatan Cilegon sendiri terdapat perbukitan yang konon dahulu ada kaki gunung sunda yang puncaknya menembus awan dan ketinggiannya hampir sama dengan himalaya. Gunung ini pada masa jutaan tahun yang lalu meletus meninggalkan kawah raksasa yang kemudian setelah ribuan tahun berubah menjadi danau yang kini dikenal dengan rawa dano, dano purba. Cerita tentang bahwa asal-usul orang Banten, termasuk orang Cilegon, dari kawasan rawa purba ini pertama kali diungkapkan oleh Husein djajadiningrat pada kongres javanologi di Solo tahun 1923. Dalam orasinya ia menyampaikan tentang cerita lisan yang ia transkrip dari pamannya tahun 18170-an tentang asal –usul orang Banten yang besar dari daerah rawa dano ini. Tidak ada keterangan pasti, asal-

⁵ Mufti Ali, Hendri F Isnaeni, *Sejarah Kota Cilegon Riwayat Kota Baja Di Ujung Barat Pulau Jawa*,(Cilegon, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2016), h. 217

usul Cilegon dan mulai kapan apelasi toponimi ini digunakan oleh para pelancong dan menjadi nama toponim ajeg seperti sekarang. Menurut memori kolektif generasi tua di sana, Cilegon berarti kobakan air. Disebut demikian karena di sana banyak sekali ditemukan rawa-rawa air yang konon akibat tsunami yang ditimbulkan oleh letusan gunung Krakatau tahun 1483, 1814 dan 1883. Namun sumber lain juga menyatakan bahwa Cilegon berasal dari kata *legon* atau nama sejenis pohon yang menyerupai pohon nira atau kelapa. Ini merujuk kepada kenyataan bahwa dahulu, wilayah yang sekarang disebut dengan daerah Cilegon dipenuhi oleh pohon kelapa. Sumber lain menyatakan bahwa *cilegon* berasal dari kata *legong* yang berarti ‘bahwa kondisi tanah yang legok atau lepong’ daerah yang *legong* berada di sekitar masjid agung atau di depan rumah dinas walikota Cilegon. Menurut kesaksian informan bahwa pada tahun 1970-an jalan raya di sekitar pos polisi terlihat agak tinggi dan di bagian masjid tanahnya agak ceking, namun kemudian setelah beberapa kali perbaikan sekarang terlihat rata. Bahwa menurut informan yang sama, Cilegon dalam tulisan –tulisan dahulu ditulis dengan

tjilegong. Bahkan dalam bahasa Jawa Cilegon bentuk tanah yang cekung atau berupa sebuah lubang disebut dengan belegongan.⁶

B. Letak Geografis

Secara geografis, kota Cilegon terletak antara $105^{\circ} 54' 05''$ – $106^{\circ} 05' 11''$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 52' 24''$ – $6^{\circ} 04' 07''$ Lintang Selatan yang dibatasi oleh:

Sebelah Barat : Selat Sunda
 Sebelah Utara : Kabupaten Serang
 Sebelah Timur : Kabupaten Serang
 Sebelah Selatan : Kabupaten Serang⁷

Ditinjau dari aspek geostrategis, kota Cilegon memiliki peran dan posisi yang sangat menentukan dalam mendukung arah dan pola pembangunan dan pengembangan perkotaan baik dalam konstelasi regional, nasional, dan bahkan internasional yaitu:

1. Kota Cilegon sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah provinsi Banten

⁶ Mufti Ali, Hendri F Isnaeni, *Sejarah Kota Cilegon Riwayat Kota Baja Di Ujung Barat Pulau Jawa*, (Cilegon, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2016), h. 18

⁷ Mufti Ali, Hendri F Isnaeni, *Sejarah Kota Cilegon Riwayat Kota Baja Di Ujung Barat Pulau Jawa*, (Cilegon, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2016), h. 3

2. Kota Cilegon sebagai sistem jaringan utilitas dan pergerakan Jawa-Sumatra
3. Kota Cilegon sebagai potensi inlet-outlet terhadap lokasi pasar dunia

Kota Cilegon merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Cilegon dan kotamadya daerah tingkat II Depok. Sebagai kota yang berada di ujung barat pulau jawa, kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan pulau jawa dengan Sumatra. Secara administratif, dengan ditetapkannya peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang pembentukan kelurahan di kota Cilegon, Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,51 km² yang terbagi ke dalam 8 (delapan) kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) kelurahan. Pembagian wilayah serta jumlah kecamatan dan kelurahan di kota Cilegon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jumlah kecamatan dan kelurahan di kota Cilegon⁸

No	Kecamatan	Pusat kecamatan	Luas		Jumlah kelurahan
			Km ²	%	
1	Ciwandan	Tegal ratu	51,81	29,52	6
2	Citangkil	Kebonsari	22,98	13,09	7
3	Pulomerak	Tamansari	19,86	11,32	4
4	Purwakarta	Purwakarta	15,29	8,71	6
5	Grogol	Grogol	23,38	13,32	4
6	Cilegon	Ciwaduk	9,15	5,21	5
7	Jombang	Jombang wetan	11,55	6,58	5
8	Cibeber	Kalitimbang	21,49	12,24	6
Kota Cilegon			175,51	100,00	43

C. Kondisi Demografis

dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2000-2010) jumlah penduduk kota Cilegon mengalami perubahan sebesar 26,96% (bertambah sebesar 79,528 jiwa) atau setara dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,44% per tahun. Proses perkembangan jumlah penduduk dari 294,936 jiwa pada 2000 menjadi 374,464

⁸ Mufti Ali, Hendri F Isnaeni, *Sejarah Kota Cilegon Riwayat Kota Baja Di Ujung Barat Pulau Jawa*, (Cilegon, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2016), h. 1

jiwa pada 2010 dicirikan dengan proses pertumbuhan yang relatif stagnan dari tahun ke tahun. Pada lima tahun pertama (2000-2005) pertumbuhan penduduk mencapai sebesar 13,89%, atau sekitar 2,32% per tahunnya. Selanjutnya pada periode lima tahun kedua (2005-2010), pertumbuhan penduduk relatif menurun yakni hanya sebesar 11,48%, atau sekitar 1,91% per tahunnya. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan penduduk kota cilegon per lima tahun selama kurun waktu 2000-2010 adalah sebesar 12,69%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahunan pada periode yang sama yakni rata-rata sebesar 2,44% per tahun.

Relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk di kota Cilegon selain karena adanya penambahan penduduk secara alami, juga dipengaruhi oleh peristiwa migrasi penduduk yang masuk sebagai pencari kerja maupun tenaga kerja yang merupakan implikasi atas bertumbuhkembangnya kondisi perekonomian kota Cilegon, khususnya pada sektor industri, perdagangan dan jasa.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk tersebut, kepadatan penduduk di Kota Cilegon juga mengalami peningkatan dari

1.680 jiwa/km² pada 2000 menjadi 1.914 jiwa/km² pada 2005, dan kembali meningkat menjadi 2.134 jiwa/km² pada 2010. Dan pada tahun 2011 menjadi 2.198 jiwa/km². Konsentrasi kepadatan penduduk pada 2011 tertinggi di kecamatan Jombang yang mencapai sebesar 5.377 jiwa/km². Sedangkan kecamatan Ciwandan merupakan kecamatan terendah kepadatan penduduknya yakni mencapai sekitar 850 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk di kecamatan Jombang dikarenakan kecamatan ini merupakan kawasan pusat pemukiman penduduk, sebaliknya kecamatan Ciwandan yang kepadatannya rendah dikarenakan kecamatan ini wilayah didominasi oleh kawasan perindustrian.

Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota
Cilegon Per Tahun 2005 Dan 2011⁹

No	Kecamatan	★	2005		2011	
			★★	★★★	★★★★	★★★★★
1	Ciwandan	51,81	3.552	744	44,063	850
2	Citangkil	22,98	55.589	2.419	67,287	2,928
3	Pulomerak	19,86	41.801	2.099	43,856	2,208

⁹ Mufti Ali, Hendri F Isnaeni, *Sejarah Kota Cilegon Riwayat Kota Baja Di Ujung Barat Pulau Jawa*, (Cilegon, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2016), h. 8

4	Purwakarta	15,29	32.291	2.120	39,126	2,559
5	Grogol	23,38	36.680	1.576	39,891	1,706
6	Cilegon	9,15	37.077	4.048	40,669	4,445
7	Jombang	11,55	53.931	4.669	62,108	5,377
8	Cibeber	21,49	39.992	1.861	48,720	2,267
Kota cilegon		175,51	335,913	1,194	385,720	2,198

Keterangan kolom:

★ Luas Wilayah (Km²) ★★ Penduduk (Jiwa) ★★★
 Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km²)

Jika diperhatikan dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap (sex rasio) di kota Cilegon, terlihat bahwa pada 2011 sex rasionya sebesar 105, yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki 5% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex rasio terbesar terdapat di kecamatan Ciwandan dan kecamatan Purwakarta yakni sebesar 107, sedangkan terendah terdapat di kecamatan Cibeber yakni sebesar 102.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kota
Cilegon Per Tahun 2011¹⁰

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex ratio (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Ciwandan	22,717	21,346	44,063	106
2	Citangkil	34,392	32,895	67,287	105
3	Pulomerak	22,373	21,483	43,856	104
4	Purwakarta	20,234	18,892	39,126	107
5	Grogol	20,421	19,470	39,891	105
6	Cilegon	20,703	19,966	40,669	104
7	Jombang	31,780	30,328	62,108	105
8	Cibeber	24,610	24,110	48,720	105
Kota Cilegon		197,230	188,490	385,720	105

D. Visi & Misi Kota Cilegon

Suatu daerah baik tingkat kota maupun provinsi tentu memiliki visi dan misi tersendiri untuk mencapai tujuan yang di inginkan adapun visi dan misi kota Cilegon sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya Kota Cilegon Yang Unggul Dan Sejahtera
Berbasis Industri Perdagangan Dan Jasa ”

¹⁰ Mufti Ali, Hendri F Isnaeni, *Sejarah Kota Cilegon Riwayat Kota Baja Di Ujung Barat Pulau Jawa*, (Cilegon, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2016), h. 9

b. Misi

- 1) Memantapkan kemandirian perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
- 2) Memantapkan lingkungan kota yang asri dan lestari
- 3) Memantapkan kualitas hidup masyarakat
- 4) Memantapkan pelayanan sarana dan prasarana kota
- 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan

c. Motto

“Akur Sedulur Jujur Adil Makmur”

E. Sejarah Forum Kerukunan Umat Beragama

Delapan belas tahun tepat pada tahun 2000 Banten menjadi provinsi, pada tahun 2003 pemerintah provinsi Banten mulai melakukan persiapan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama waktu itu istilahnya Forum Komunikasi Umat Beragama. Tanggal 21 mei 2003 pemerintah provinsi Banten mengundang tokoh-tokoh Agama untuk membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), undangan ditanda tangani oleh Hj. Ratu Atut Chosiah, S.E selaku wakil gubernur, rapat dipimpin oleh sekda bapak Drs. H Choiron Muhsin. Rapat

tanggal 21 Maret 2003 tidak menghasilkan keputusan Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) karena terjadi pro kontra tentang keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), rapat akhirnya merekomendasikan perlu dikaji lebih jauh tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di provinsi Banten. Pada tanggal 7 Agustus 2003, terbit SK Gubernur Banten No. 456/kep.169-Huk /2003 tentang tim kajian pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tim ini beranggotakan 20 orang, saudara Suparman Usman dipercaya sebagai ketua tim tugas tim antara lain adalah melaksanakan kajian yang berkaitan dengan kerukunan hidup umat beragama dalam rangka pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tim bekerja selama delapan bulan, tim melaksanakan kajian dengan mencari berbagai informasi dan bahan masukan dari masyarakat. Akhirnya tim dapat melaporkan hasil kerjanya pada tanggal 11 Desember 2003, salah satu rekomendasi hasil kerjanya adalah merekomendasikan kepala gubernur agar memfasilitasi pembentukan sekretarian

bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi Banten.¹¹

Tanggal 23 Januari 2004 terbit SK Gubernur No.456/kep.II-Huk/2004 tentang pembentukan sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi Banten periode 2004 -2008. Sehubungan dengan keluarnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan 8 tahun 2006 maka keluarlah SK Gubernur tanggal 4 Juli 2007 tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dikukuhkan / dilantik oleh gubernur pada tanggal 17 Desember 2007, lahirnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi Banten ini diwarnai oleh proses yang dinamis tidak dipaksakan, dalam proses berikutnya kemudian lahir Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten dan kota se-provinsi Banten

¹¹ Suparman Usman, Habibi Asyafah, *Sembilan Tahunn Kiprah FKUB Provinsi Banten*,(Serang, Sehati Grafika, 2016), h. 69

a. Lahirnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Kota Cilegon

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Cilegon dibentuk berdasarkan SK Walikota No. 450.05/kep.125-org/2009 tanggal 23 Februari 2009. Saat ini Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Cilegon diketuai oleh Dr. K. H. Abdul Karim Ismail, M.A. dan H. Mahrur muslim, S.Sos.I. Sekretariat forum kerukunan umat beragama (FKUB) kota Cilegon saat ini di komp. Rumah Dinas walikota Cilegon Jl.S.A. Tirtayasa Jombang Cilegon. Penduduk kota Cilegon berjumlah 424.094 jiwa, sebagian besarnya adalah pemeluk Agama Islam yang tersebar secara merata di delapan kecamatan. Pemeluk agama kristen mayoritas berada di kecamatan Jombang, kecamatan Citangkil dan kecamatan Cibeber, penganut katolik mayoritas berada di kecamatan Jombang dan Cibeber, pemeluk agama hindu mayoritas berada di kecamatan Cibeber dan kecamatan Cilegon, pemeluk agama Budha mayoritas berada di kecamatan Jombang,

kecamatan Cilegon dan Cibeber, sedangkan pemeluk Agama Konghucu mayoritas berada di kecamatan Cibeber.¹²

Berikut perincian penduduk berdasarkan agama yang dianut di wilayah kota Cilegon;

Data Jumlah Penduduk Kota Cilegon Berdasarkan Agama Yang Dianut¹³

Kecamatan	islam	Kristen	katholik	hindu	budha	konghucu	lainnya
Cibeber	47,043	1,150	385	83	160	15	7
Cilegon	47,388	885	235	76	169	1	2
Pulomerak	49,394	728	181	36	74	11	0
Ciwandan	52,155	95	10	2	29	5	3
Jombang	62,016	1,461	558	41	998	13	0
Grogol	42,867	382	42	22	25	0	0
Purwakarta	40,476	925	255	44	65	2	1
Citangkil	72,105	1,286	123	23	27	11	3
Jumlah	413,444	6,912	1,789	327	1,547	58	16

¹² Suparman Usman, Habibi Asyafah, *Sembilan Tahunn Kiprah FKUB Provinsi Banten*, (Serang, Sehati Grafika, 2016), h. 82

¹³ Suparman Usman, Habibi Asyafah, *Sembilan Tahunn Kiprah FKUB Provinsi Banten*, (Serang, Sehati Grafika, 2016), h. 82

F. Tugas Kerukunan Umat Beragama

Secara yuridis didalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pasal 9 ayat (2) No. 9 dan 8 tahun 2006 tugas Forum Kerukunan Umat Beragama adalah;

Pasal 9

(2) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas;

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasisebagai sebagai bahan kebijakan bupati/walikota
- d. Melakukan sosialisasi peaturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan keruknan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;dan

- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat¹⁴

G. Struktur Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon

Susunan Pengurus

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Kota Cilegon

Dewan Penasehat

Ketua : Wakil Walikota Cilegon

Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama Kota Cilegon

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan
Perlindungan Masyarakat Kota
Cilegon

Anggota :

1. Kapolres Cilegon
2. Dandim 0623 Kota Cilegon
3. Kejari Kota Cilegon

¹⁴ *Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Dan 8 Tahun 2006*

4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota
Cilegon
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cilegon
6. Kabid Kesatuan Bangsa Pada Badan Kesatuan Bangsa
Dan Perlindungan Kota Cilegon.

Pengurus harian

- Ketua : Drs. H. Abdul Karim Ismail (Unsur DDI)
- Wakil Ketua I : H. Syam'un Abduh (Unsur Ponpes)
- Wakil Ketua II : Drs. H. Alwani (Ketua MUI Kota Cilegon)
- Sekretaris : Drs. H. Machrur Muslim (Unsur Forkom DKM)
- Wakil Sekretaris : H. Masnun, S.Ag. (Unsur MDI)
- Anggota :

1. Drs. Hikmatullah Jamud (Unsur Al-Khairiyah)
2. Ir. Achmad Atqo Asyhari, M.Eng (NU)
3. H. Arie Purnomo (Muhammadiyah)
4. H. Hilmi Abdul Majid (Aljauharatunnaqiyah)
5. Drs. H. Idris Arbain (MUI)
6. H. Tb. Habibi (MUI)
7. Drs. H. Zein Falah (MUI)

8. Drs. Djapiter Tinambunan (Kristen)
9. Ignatius Heryanto Sudarso (Katolik)
10. Ateng Setiana Sujana, SH (Budha)
11. Ir. I Ketut Sunarwa, M. Eng (Hindu)
12. Djuanda Sidharta (Konghucu)